

## RINGKASAN

Permasalahan tidak meratanya penyaluran bansos terjadi di banyak daerah di Indonesia salah satunya di Kelurahan Teluk. Kelurahan tersebut, terdapat permasalahan bansos yang tidak merata hingga permasalahan pemotongan bansos masyarakat penerima untuk dibagikan kepada masyarakat yang tidak menerima bansos. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya permasalahan ketidakmerataan pendistribusian bantuan sosial di Kelurahan Teluk, serta upaya penanganan dari masyarakat setempat dan pemerintah Kelurahan terkait permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dan mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang konflik yang terjadi di masyarakat akibat bansos dan penanganannya. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Teluk dengan sasaran penelitian utama yaitu warga Teluk yang menerima bansos dan non penerima bansos, serta sasaran pengertian pendukung yaitu dari Pemerintah Kelurahan Teluk dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif dengan validasi data triangulasi sumber dari pemerintah Kelurahan Teluk dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.

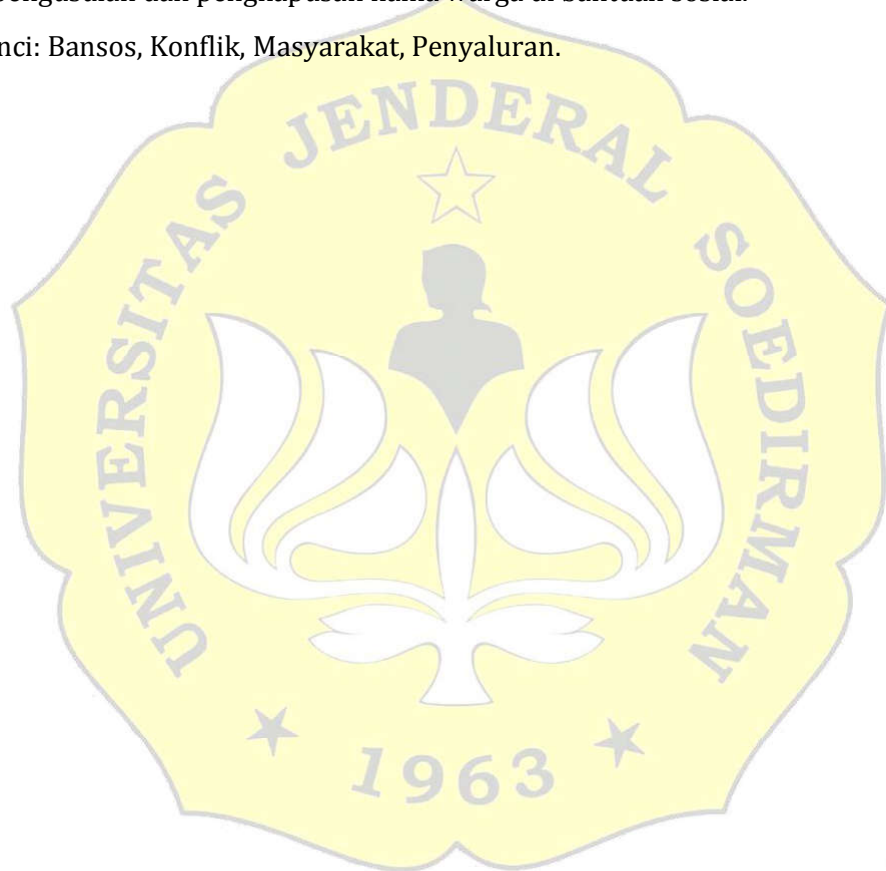
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan peta konflik yang ada di Kelurahan Teluk beserta dengan penanganannya. Bersumber dari tidak meratanya bantuan sosial di Teluk mengakibatkan timbulnya beberapa konflik antara lain yang pertama, Pertama pemotongan penerimaan bansos, dengan motif untuk membagikan kepada warga yang tidak mampu tetapi belum mendapatkan bansos. Dengan hasil pemotongan tersebut sudah tidak ada, karena laporan dari warga. Temuan yang kedua ialah pemotongan biaya administrasi di agen pengambilan bansos, yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman warga tentang mekanisme penyaluran bansos. Isu ini masih ada hingga saat ini, Temuan yang ketiga banyak bantuan sosial yang masih belum tepat sasaran. Pada saat ini masih terdapat isu yang sama dikarenakan banyak faktor. Hal ini bisa ditanggulangi apabila sistem *button up* diterapkan pada setiap RT di kelurahan teluk.

Temuan yang terakhir ialah tidak adanya transparansi dari pemerintah terkait data penerima bansos yang masih terjadi hingga saat ini. Adapun penjelasan dari ini pemerintah Kelurahan Teluk dan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas terkait data masyarakat penerima bansos bahwa data awal penerima bansos ialah data dari BPS tahun 2011-2012 yang bersifat makro. Sedangkan data mikro terdapat pada aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*) yang dapat diakses oleh desa/kelurahan masing-masing dan desa/kelurahan yang mempunyai kewajiban untuk meng-update data warganya yang ekonominya sudah berubah. Terdapat

pengajuan usulan bansos sekarang dapat mengajukan lewat website DTKS lewat desa/kelurahan, yang dapat diakses pada tanggal 15-25 tiap bulannya.

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat dijadikan bahan rekomendasi bagi masyarakat Kelurahan Teluk untuk mengetahui manfaat bantuan sosial ini disalurkan hanya untuk masyarakat yang tidak mampu. Oleh karena itu, baiknya masyarakat yang sekiranya sudah mampu agar dengan sadar mengajukan diri untuk dihapus dari data penerima bantuan sosial. Serta diharapkan Pemerintah Kelurahan Teluk diharapkan rutin untuk mengupdate data masyarakatnya, menyalurkan informasi dengan lebih efektif lagi, serta menghimbau para kepala RT agar rutin memperhatikan warganya terkait pengusulan dan penghapusan nama warga di bantuan sosial.

Kata kunci: Bansos, Konflik, Masyarakat, Penyaluran.



## SUMMARY

The problem of unequal distribution of social assistance occurs in many regions in Indonesia, one of which is Teluk Subdistrict. In this sub-district, there is a problem of unequal distribution of social assistance, including the problem of cutting social assistance from recipient communities to be distributed to people who do not receive social assistance. This is done so that all people feel the social assistance provided by the government. Therefore, this research was conducted to look at the unequal distribution of social assistance problems in Teluk Subdistrict, as well as the handling efforts of the local community and the subdistrict government regarding these problems.

This study uses a descriptive qualitative research method to describe and obtain a deeper explanation of the conflicts that occur in the community due to social assistance and its handling. Researchers collect data through in-depth interviews, observations, and documentation. This study was conducted in Teluk Village with the main research targets being Teluk residents who receive social assistance and non-social assistance recipients, and the supporting understanding targets are from the Teluk Village Government and the Banyumas Regency Social and Community Services Office. This study uses interactive data analysis with triangulation data validation from sources from the Teluk Village Government and the Banyumas Regency Social and Community Services Office.

The results of this study can be concluded as a map of conflicts in Teluk Village along with their handling. Originating from the uneven distribution of social assistance in Teluk, several conflicts have arisen, including the first, First, the deduction of social assistance receipts, with the motive of distributing it to residents who are unable but have not received social assistance. With the results of the deduction, there is no longer any, because of reports from residents. The second finding is the deduction of administrative costs at social assistance collection agents, which is related to the knowledge and understanding of residents about the mechanism for distributing social assistance. This issue still exists today, the third finding is that much social assistance is still not on target. At present there are still the same issues due to many factors. This can be overcome if the button up system is applied to each RT in Teluk Village. The last finding is the lack of transparency from the government regarding data on social assistance recipients which is still happening today. The explanation from this, the Teluk Village government and the Banyumas Regency Social and Community Services Agency regarding data on social assistance recipients, that the initial data on social assistance recipients is data from BPS in 2011-2012 which is macro in nature. Meanwhile, micro data is available in the SIKS-NG (Next Generation Social Welfare Information System) application which can be

accessed by each village/sub-district and villages/sub-districts that have an obligation to update data on their citizens whose economy has changed.

There is a submission of social assistance proposals that can now be submitted via the DTKS website via the village/sub-district, which can be accessed on the 15th-25th of each month. The results of this study are expected to be used as a recommendation for the Teluk Sub-district community to find out the benefits of this social assistance which is distributed only to the underprivileged. Therefore, it is better for people who are already able to consciously apply to be removed from the data of social assistance recipients. It is also hoped that the Teluk Sub-district Government will routinely update its community data, distribute information more effectively, and urge RT heads to routinely pay attention to their residents regarding the proposal and deletion of residents' names in social assistance.

Keywords: Social Assistance, Conflict, Community, Distribution.

